DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/21/DPRD/XI/2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah melalui mekanisme secara terencana, terpadu dan sistematis, perlu dilakukan penetapan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan skala Prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal, 26 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PANGKALPINANG
WAKIL KETUA,

BANGUN JAYA, S.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 188.4/21/DPRD/XI/2024
TANGGAL : 26 November 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status Baru/ Ubah		Pelaksanaan	SKPD Terkait	Target Pencapaian (Masa Persidangan)	Ket
				Baru	Ubah				
1.	Raperda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024		Baru		Rutin	BADAN KEUANGAN DAERAH	Sesuai Pemerintah Kota Pangkalpinang	
2.	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025			Ubah	Rutin	BADAN KEUANGAN DAERAH	Sesuai Pemerintah Kota Pangkalpinang	
3.	Raperda	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		Baru		Rutin	BADAN KEUANGAN DAERAH	Sesuai Pemerintah Kota Pangkalpinang	
4.	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah			Ubah		BADAN KEUANGAN DAERAH	Masa Persidangan III (Bulan Mei s.d. Agustus)	
5.	Raperda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029		Baru			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Masa Persidangan II (Bulan Januari s.d. April)	
6.	Raperda	Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029		Baru			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Masa Persidangan III (Bulan Mei s.d. Agustus)	

7.	Raperda	Inovasi Daerah		Baru			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Masa Persidangan III (Bulan Mei s.d. Agustus)	
8.	Raperda	Kepemudaan		Baru			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Masa Persidangan II (Bulan Januari s.d. April)	
9.	Raperda	Penyidik Pegawai Negeri Sipil		Baru			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Masa Persidangan III (Bulan Mei s.d. Agustus)	
10.	Raperda	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha		Baru			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Masa Persidangan I (Bulan September s.d. Desember)	
11.	Raperda	Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal			Ubah		DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Masa Persidangan III (Bulan Mei s.d. Agustus)	
12.	Raperda	Penyelenggaraan Reklame		Baru			DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Masa Persidangan II (Bulan Januari s.d. April)	
13.	Raperda	Registrasi Surat Tanah		Baru			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masa Persidangan II (Bulan Januari s.d. April)	
14.	Raperda	Persetujuan Lingkungan		Baru			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Masa Persidangan I (Bulan September s.d. Desember)	
15.	Raperda	Pengelolaan Sampah			Ubah		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Masa Persidangan III (Bulan Mei s.d. Agustus)	
16.	Raperda	Kawasan Tanpa Rokok			Ubah		DINAS KESEHATAN	Masa Persidangan I (Bulan September s.d. Desember)	

17.	Raperda	Penyelenggaraan Pangkal Pinang Smart City		Baru			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Masa Persidangan II (Bulan Januari s.d. April)	
18.	Raperda	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2044		Baru			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masa Persidangan II (Bulan Januari s.d. April)	
19.	Raperda	Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah		Baru			DPRD	Masa Persidangan III (Bulan Mei s.d. Agustus)	Inisiatif

DPRD KOTA PANGKALPINANG
WAKIL KETUA,

BANGUN JAYA, S.H.